

**Judul** : RAPBN 2017 Jangan Terjebak Asumsi Makro  
**Tanggal** : Rabu, 24 Agustus 2016  
**Surat Kabar** : Republik  
**Halaman** : 2

## RAPBN 2017 Jangan Terjebak Asumsi Makro

DOK. PEMBERITAAN DPR



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima pandangan F-Gerindra terhadap RAPBN 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 2.070 triliun, untuk dibahas lebih lanjut ke tingkat teknis.

Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, sebagian besar fraksi setuju dengan rancangan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Ia mengatakan, dalam pandangan fraksi di Rapat Paripurna, ada fraksi yang berbicara optimistis, ada juga yang mengingatkan agar pemerintah berhati-hati.

"Sehingga kita berharap sentuhan dari pemerintah, yang tidak terpacu kepada asumsi-asumsi makro saja. Tetapi yang pro rakyat sesuai Nawacita dan didukung oleh DPR, untuk bisa menyentuh aspek kebutuhan dan kehidupan masyarakat," kata Taufik, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Taufik melanjutkan, RAPBN 2017 juga mesti menyelesaikan persoalan riil, seperti pengurangan kemiskinan, penambahan lapangan pekerjaan, dan penurunan gini ratio. Ia meminta agar asumsi ekonomi pada 2017 tidak hanya berfokus pada asumsi makro.

"Tetapi asumsi makro itu harus bisa seiring senapas dengan kehidupan masyarakat," pintanya.

Dia menilai, RAPBN 2017 ini cukup realistis dan sangat dinamis. Dirinya juga menghormati pandangan-pandangan fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpinnya tersebut.

Pada prinsipnya, kata dia, tidak ada fraksi yang menolak agar RAPBN ditindaklanjuti dalam pembahasan berikutnya. Meski, secara substansial akan dibahas di dalam Badan Anggaran bersama dengan pemerintah, dan pengambilan keputusan nanti akan diputuskan dalam UU APBN 2017.

Politisi PAN tersebut menuturkan, aspek perbaikan ekonomi harus jadi

prioritas bersama antara pemerintah dan DPR. Tetapi sekali lagi, Taufik mengaskan, asumsi tersebut jangan hanya terjebak pada asumsi makro, tapi harus relevan dengan kehidupan di masyarakat.

"Misalnya, tidak hanya sekadar mengendalikan laju inflasi, dengan memperbaiki keran impor. Tapi bagaimana agar daya beli masyarakat bisa terjangkau, pengurangan kemiskinan terjadi, lapangan pekerjaan tercipta, dan infrastruktur berjalan. Intinya, DPR mendukung rencana pemerintah untuk perbaikan ekonomi," ucap dia.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Nizar Zahro, sependapat dengan pemerintah bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, sesuai dengan harapan pemerintah, APBN ke depan perlu disusun secara realistis. Sehingga mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun jangka menengah.

"Meskipun demikian, tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya pemerintah di atas, F-Gerindra menilai bahwa RUU APBN 2017 dan pokok-pokok Nota Keuangan masih jauh dari harapan untuk mengedepankan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan Pembangunan Nasional," jelasnya.

Nizar menambahkan, niat baik pemerintah untuk melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan masih terkendala oleh minimnya ruang fiskal. Sebab, keterbatasan ruang fiskal tahun depan agaknya masih akan terus berlanjut, karena tidak tercapainya target perolehan pendapatan negara yang telah ditetapkan.

Juru Bicara Fraksi Partai Amanat

Nasional (PAN) di DPR, Sukiman menyebutkan bahwa fraksinya setuju menindaklanjuti RUU APBN Tahun 2017, ke tahapan selanjutnya.

Dalam kesempatannya, F-PAN menegaskan agar pemerintah tidak melakukan penambahan utang negara dalam anggaran RAPBN 2017 lantaran kondisi hutang sudah kian membengkak. "Menolak penambahan utang negara yang akan direncanakan memasukkan pada anggaran 2017 ini, karena utang saja sudah mulai membengkak," ujar Sukiman.

Sirmadji dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, politik anggaran hendaknya dikembalikan pada fungsi anggaran untuk kemakmuran rakyat. Pembahasan RAPBN 2017 harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan UU Pasal 33.

Menurutnya, penetapan pertumbuhan ekonomi hendaknya membawa dampak untuk menggerakkan sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga harus berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM.

Target inflasi juga harus memperhatikan kondisi riil masyarakat. "Target inflasi harus memperhatikan kondisi rakyat, F-PDI Perjuangan mendorong pengawasan ketat," ucapnya.

Fraksi Partai Golkar, diwakili oleh Eka Sastra, menyatakan RAPBN 2017 telah memenuhi aspek dan lebih realistis. F-PG melihat RAPBN 2017 yang diajukan pemerintah telah kredibilitas dan realistis.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2017 semestinya bisa ditingkatkan lebih tinggi. "Pertumbuhan kemarin merupakan batas terbawah, harus ditingkatkan," ujar dia.

Mereka juga berharap, inflasi yang diperkirakan mencapai 4 persen, masih bisa diturunkan hingga 3,5 persen. F-PG juga meminta pemerintah mampu menyalasi harga pangan dan memperhatikan kenaikan harga pangan untuk menekan inflasi. ● rfi